

SURAT PERNYATAAN

N a m a : Arsyah Khaidir Hidayat

NIM. : C31205004

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Judul : Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby Tentang Tergugat Tidak *Legal Standing*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat dari skripsi orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 19 Januari 2010



Arsya Khaidir H
NIM. C31205004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arsyah Khaidir Hidayat ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 09 Pebruari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua

Ketua,

Prof. Dr. H. A. Saiful A. M. Ag
NIP. 195511171991031001

Sekretaris,

Sekretaris,

Darmawan, SHI, MHI
NIP. 198004102005011004

Penguji I,

Chinl.

Dra. Hj. S. Dalilah C. M. Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II,



Muwahid, SH, MH
NIP. 197803102005

Pembimbing.

Thy

Prof. Dr. H/A. Saiful A. M. Ag
NIP. 195511171991031001

Surabaya, 22 Pebruari 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Декан.



Drs. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby tentang Tergugat tidak *Legal Standing* dalam Perkara Waris". Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, 1) Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim PA Surabaya mengabulkan gugatan penggugat dalam putusan No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby. 2) Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya dalam putusan No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby yang membatalkan putusan PA Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby. 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan PA Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh PTA Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby tentang tergugat tidak *legal standing* dalam perkara waris.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim PA Surabaya dan PTA Surabaya sebagai objek yang diteliti, kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berhubungan dengan putusan hakim sebagai objek penelitian, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, yang kemudian ditarik kesimpulan tentang alasan pembatalan putusan PA Surabaya oleh PTA Surabaya.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa, PTA Surabaya membatalkan putusan PA Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby karena menurut hakim PTA Surabaya terdapat kesalahan identitas dalam gugatan yang tidak sesuai dengan pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni Sablah yang telah meninggal dunia tetap dijadikan tergugat V, padahal Sablah sudah tidak memiliki *legal standing*. Oleh karena itu menyebabkan cacat formil kesalahan identitas dan salah sasaran pihak yang digugat sehingga gugatan tidak dapat diterima. Adapun analisis hukum Islam membenarkan putusan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Surabaya, dimana Sablah yang sudah meninggal dunia tidak bisa dituntut dijadikan tergugat V karena sudah tidak mempunyai kecakapan bertindak/kapasitas (*legal standing*). *Legal standing* ini dapat dihubungkan dengan istilah *ahliyyah* (kecakapan). Orang yang sudah meninggal dunia sudah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dunia karena kecakapan seseorang secara sempurna hilang sama sekali.

Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya dalam memutus suatu perkara, hendaknya seorang hakim di Pengadilan harus lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN, GUGATAN, DAN AHLIYAH	15

B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	42
1. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	42
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	44
C. Deskripsi Kasus tentang Tergugat tidak <i>Legal Standing</i> dalam Perkara Waris No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby	44
D. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Memutuskan Perkara No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby	60
E. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Memutuskan Perkara No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby	71
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA SURABAYA OLEH PTA SURABAYA	76
A. Analisis terhadap Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby	76
B. Analisis terhadap Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby	81
C. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby tentang Tergugat tidak <i>Legal Standing</i> dalam Perkara Waris	85
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN



PERPUSSTAN AN KARANG SURABAYA	
NO. KLAS K S-2010 005 AS	NO. REG : S-2010/AS/005 ASAL BUKU : TANGGAL :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk pasti mati. Tiada orang yang mengetahui kapan dia akan mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut akan menjemput.

Bagi umat Islam, kematian bukan akhir dari kehidupan karena kehidupan itu abadi. Di dalam hidupnya, manusia menempuh 4 (empat) alam, yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Oleh sebab itu, kelahiran adalah akhir dari alam rahim dan awal dari alam dunia. Begitu pula, kematian adalah akhir dari alam dunia dan awal dari alam kubur.¹

Allah telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syariah atau hukum syara' yang sekarang ini disebut hukum Islam.²

¹ Otje Salman S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 1

² Moh. Muhibbun dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, h. 1

Bagi umat Islam di Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang telah dipergunakan dan pedoman dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam menyelesaikan harta warisan, di samping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.⁶

Bahwa pengadilan merupakan salah satu simbol dari kekuasaan dan Pengadilan Agama Islam adalah simbol dari kekuasaan Islam, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, wewenang Pengadilan Agama dapat mengadili sengketa tentang kewarisan menurut Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 51 yaitu:

“Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding”¹⁷

Masalah sengketa waris yang ingin penulis kaji ini merupakan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby. Akar masalahnya berasal dari kesimpangsiuran

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum....* h. 4

⁷ Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 Pasal 51

seorang bernama Taker dan Rejo yang dalam akta pembagian waris No. 144/Komp./1994/PA. Sby disebutkan sebagai anak kandung Mudrikah, sehingga setelah Mudrikah meninggal dunia mereka mewarisi harta warisan Mudrikah. Dan sekarang harta warisan itu dikuasai anak-anak Taker dan Rejo. Karena para penggugat merasa sebagai ahli waris Mudrikah, sehingga mereka mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Surabaya dan dalam proses pembuktian terbukti bahwa Taker dan Rejo bukan anak kandung Mudrikah. Sehingga Taker dan Rejo sebenarnya tidak berhak mendapat warisan dari Mudrikah. Dengan demikian sekarang terungkap bahwa penguasa harta warisan tersebut bukan ahli waris yang sah dari Mudrikah.

Dalam perkara ini tidak hanya berakhir di Pengadilan Agama, akan tetapi sampai pada tingkat banding. Hal ini disebabkan karena tergugat tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan gugatan penggugat meskipun hanya sebagian. Mereka berpendapat bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena ada salah satu ahli waris dalam hal ini tergugat V yang telah meninggal dunia sehingga tidak mempunyai *legal standing*, sehingga terdapat cacat formil dan tidak dapat diterima gugatannya. Kemudian para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, setelah hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa, menimbang dan mengadili memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya.

Dari pemaparan di atas timbul suatu permasalahan mengapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya. Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA.Sby tentang Tergugat tidak *Legal Standing* dalam Perkara Waris”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, supaya penelitian ini dapat terarah dan terfokus, maka pokok permasalahan yang akan dibahas ialah:

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan gugatan penggugat dalam putusan No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby?
2. Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby tentang tergugat tidak *legal standing* dalam perkara waris?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Masalah waris sangat penting untuk dipelajari, karena hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, sehingga yang membahas dan mengkaji masalah waris ini juga banyak. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi saudara Citra Puspita Sari dalam skripsinya “Studi analisis terhadap putusan PA Surabaya dan PTA Surabaya yang menyelesaikan perkara gugatan waris” 2006. Skripsi tersebut membahas masalah pembatalan putusan PA Surabaya oleh PTA Surabaya karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak melampirkan akta nikah atau akta cerai.

Dalam skripsi yang ditulis Rosidatul Fitriyah dengan judul skripsi "Pembatalan Putusan oleh Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya tentang Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan No. 446 K/AG/1999)" 2007. Skripsi tersebut membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris yang *obscur libel* yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung menganggap gugatan tersebut tidak *obscur libel*.

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA Sby tentang Tergugat tidak *Legal Standing* dalam Perkara Waris” penulis memfokuskan tentang putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA Sby dikarenakan ada salah satu ahli waris dalam hal ini tergugat yang tidak mempunyai *legal standing*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan gugatan penggugat dalam putusan No. 1440/Pdt.G/2007/PA Sby.
2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby.

3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby tentang tergugat tidak *legal standing* dalam perkara waris.

E. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca dan dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kewarisan Islam dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang tergugat tidak *legal standing* dalam perkara waris.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama tentang tergugat tidak *legal standing* dalam perkara waris.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka kami memberikan definisi :

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).⁸

Putusan : Suatu produk Pengadilan atas perkara gugatan yang berdasarkan adanya suatu sengketa.⁹
 Dalam hal ini adalah putusan No. 1440/Pdt.G/2007/PA.Sby yang dibatalkan oleh putusan No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby.

Legal Standing : Golongan/kaum/orang yang mempunyai wewenang sah untuk bertindak di pengadilan.
 Dalam hal ini yakni Sablah sebagai Tergugat V yang sudah tidak memiliki *legal standing*.

Jadi maksud judul di atas adalah menyelidiki putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby tentang tergugat yang tidak memiliki *legal standing* dalam perkara waris menurut hukum Islam.

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 43

⁹ Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 42

Surabaya dalam memutuskan perkara tentang tergugat tidak *legal standing* dalam perkara waris yang sedang dianalisis oleh penulis.

b. Studi Dokumenter

Dalam penggalian data studi dokumenter penulis mengumpulkan data, putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby dan Undang-Undang yang berkaitan dengan tema pembahasan yang kemudian penulis dapat menela'ah dan menganalisa data-data tersebut.

c. Studi Pustaka

Penulis juga menggali data melalui studi pustaka dari buku-buku yang berkaitan dengan tema sebagai fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori.¹⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai objek yang diteliti, kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode deduktif yaitu metode yang diawali dengan

¹⁰ Zainal Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan Filosofi, Teori, dan Aplikasi*, h. 38

mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berhubungan dengan putusan hakim sebagai objek penelitian yaitu tentang kewarisan, gugatan, dan *ahliyyah*. Selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, yang kemudian dianalisis dengan teori tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan tentang alasan pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka kami kelompokkan dalam lima bab masing-masing bab terdiri dari subbab yang saling terkait, sehingga membentuk suatu sistematika pembahasan diantaranya :

Bab I, pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang skripsi yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan landasan teori tentang tinjauan umum tentang kewarisan yang meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan, asas-asas kewarisan, rukun dan syarat, sebab-sebab dan penghalang kewarisan serta tentang ahli waris. Kemudian tentang gugatan yang meliputi pengertian gugatan, syarat-syarat gugatan, bentuk gugatan, sistematika gugatan, dan pihak-

BAB II

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *farā'id*, *fiqh mawāris* dan *ḥukm al-wāris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Lafazh *farā'id* merupakan jama' dari lafazh *farīdah* yang mengandung arti *mafrūdah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu: sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan.¹ Dengan demikian penyebutan *farā'id* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Namun demikian *farā'id* merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri dan cukup rumit, karena cara pembagiannya senantiasa harus dikaitkan dengan ilmu berhitung,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 5

setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha, dikatakan sebagai tirkah, baik yang meninggal itu mempunyai utang-piutang yang ada hubungannya dengan harta benda seperti gadai dan utang-piutang yang berkaitan dengan kreditur, seperti *qirad*, mahar, dan lain-lain.³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 dinyatakan bahwa:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah), pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris terdapat di dalam al-Qur'an, hadis, maupun dalam kitab-kitab fiqh yang diperoleh melalui ijma' serta para ijtihad ulama' mujtahid. Dengan demikian, maka sumber hukum kewarisan Islam ada 4 (empat), yaitu:

a. Al-Qur'an

Ketentuan Allah mengenai waris diturunkan dalam al-Qur'an dengan sangat jelas. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 1, 7, 8, 9, 11, 12, 33, dan 176 juga dalam surat al-Anfāl ayat 75.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 25

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171*

Q.S. An-Nisā' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*⁵

b. Hadis

• •

 ${}^6(\quad)$

Artinya: Berikanlah faraid (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat (HR. Muslim)

c. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid kenamaan banyak perannya serta tidak sedikit sumbangsihnya terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nash-nash al-Qur'an maupun hadis.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101

⁶ Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, h. 56

⁷ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, h. 6

harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun waris ada tiga:

- 1) Adanya pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- 2) Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai dan menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan ada ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- 3) Adanya harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.¹¹

b. Syarat waris juga ada tiga:

- 1) Meninggalnya pewaris baik secara hakiki (nyata) maupun secara hukum, yaitu seseorang telah meninggal dunia dan sudah diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis kematian yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya (karena hilang dan tidak diketahui kabar beritanya, domisilinya, dan tidak diketahui hidup atau matinya).
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari pewaris

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h. 39

mayyit), leluhur (*uṣūl mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping (*al-hawasyi*). Diantara mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati adalah ayah dan ibu, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.¹⁵

2. Hubungan *Wala'*

Wala' ialah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan.¹⁶

Hubungan *wala'* ini sekarang hanya terdapat dalam wacana saja, karena perbudakan telah dihapus dalam dunia Islam.

b. Penghalang Kewarisan

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk mendapatkan warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Penghalang untuk mendapatkan warisan antara lain:

1. Pembunuhan (*al-qatl*), yaitu pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan.
2. Berlainan agama, yaitu berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris.

¹⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 29

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, (Penerjemah Mudzakir), h. 258

3. Perbudakan, seorang budak statusnya tidak bisa menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya.¹⁷

5. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala*).¹⁸ Para ahli waris jumlahnya ada 25 orang, terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Ahli waris menurut al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an disebut *ẓul farā'id*. Yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *aṣabah*. Ashabah menurut ajaran patrilineal Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Ahli waris ini juga bias disebut *ẓul qarabāt*, yakni ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak

¹⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, h.16

¹⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqih Maawaris*, h.43

tertentu jumlahnya. Hal itu kalau dilihat dari segi jumlah perolehannya dalam warisan.¹⁹

- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *zul arḥām*. Artinya orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.²⁰

B. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa, harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan menjelma menjadi perkara di sidang pengadilan. Dalam pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa tiap pemeriksaan perkara di pengadilan, dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan. Kemudian berdasar permohonan atau gugatan pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan.²¹

Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 73

²⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, h. 17-19

²¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, h. 185

Sedangkan surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.²²

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat), sedang dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan ijin talak dan permohonan ijin beristri lebih dari satu.

2. Syarat-Syarat Gugatan

Syarat gugatan ada dua, yaitu:

a. Syarat Umum, antara lain:

1. Tertulis, sesuai pokok-pokok gugatan yang harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil gugatan. Syarat-syarat formil gugatan antara lain:
 - 1) Pencantuman identitas para pihak.
 - 2) Penegasan para pihak dalam perkara yakni sebagai penggugat atau tergugat.

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 39

- 3) Mengemukakan posita atau dalil gugatan yang jelas dan terinci.
- 4) Memuat petitum atau tuntutan hukum yang diminta penggugat kepada Pengadilan.

Syarat materiil gugatan berhubungan dengan hukum materiil misalnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kewenangan Pengadilan yang bersangkutan. Misalnya Pengadilan Agama memakai hukum materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

2. Membayar Panjar Biaya Perkara (PBP).
 3. Keterangan domisili penggugat.
 4. Keterangan surat gugatan bermaterai cukup.
- b. Syarat Khusus, disesuaikan dengan perkaranya, misalnya anggota TNI harus mendapatkan surat izin dari atasannya.

3. Bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) R.Bg dan pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat (1) R.Bg. Dari ketentuan pasal-pasal dimaksud, gugatan dapat:

- a. Bentuk Tertulis

Jika gugatan berbentuk tertulis, harus memenuhi syarat formil berupa tanda tangan dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan

peraturan meterai yang berlaku. Gugatan yang berbentuk tulis inilah yang disebut surat gugatan.²³

Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Yang dimaksud dengan wakil adalah seorang kuasa yang sengaja diberi kuasa berdasarkan suatu surat kuasa khusus, untuk membuat dan menandatangani surat gugatan. Oleh karena surat gugatan ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya, maka tanggal pemberian surat kuasa harus lebih dahulu dari tanggal surat gugatan.²⁴

b. Bentuk Lisan

Pada prinsipnya semua gugatan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat, maka gugatan tersebut ditandatangani oleh Ketua/Hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) R.Bg atau pasal 120 HIR.²⁵

²³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*..... h. 187

²⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h. 16

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*..... h. 40

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Misalnya ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.
 - 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum. Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa orang tua atau wali, mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.
- b. Salah sasaran pihak yang digugat
- Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya. Mungkin saja yang ditarik sebagai tergugat tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan).
- c. Gugatan kurang pihak (*Plurius Litis Consortium*)
- Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat.

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
- b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Disebut juga ahli wajib sempurna yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban, yakni sejak seorang bayi lahir ke dunia sampai ia dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun akal nya masih kurang, seperti orang gila.

Dalam status *ahliyyah al-wujūb* (baik sempurna maupun tidak), seseorang tidak dibebani tuntutan syara', baik bersifat *ibadah mahdah* seperti shalat dan puasa, maupun yang sifatnya tindakan-tindakan hukum duniawi, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik.

b. Ahliyyah 'Ada

Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah 'ada* adalah akil, baligh, dan cerdas. Dengan demikian tidak termasuk golongan ini seperti orang gila, anak dalam kandungan, anak yang belum mumayiz, dan lain-lain.

Ahliyyah 'ada dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ahliyyah 'Ada Kurang*

Yaitu kepantasan seseorang untuk memenuhi sebagian kewajiban dan tidak pantas untuk memenuhi kewajiban lainnya. Ahli yang termasuk golongan ini adalah anak yang berusia tujuh tahun sampai usia baligh.

- 2) *Ahliyyah 'Ada Sempurna*

Yakni orang yang telah mencapai usia baligh.

3. Halangan Ahliyyah

Penentuan mampu atau tidaknya seseorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi akalnya. Berdasarkan hukum biologis, akal seseorang bisa berubah, kurang, bahkan hilang. Akibatnya, mereka dianggap tidak mampu lagi bertindak hukum. Berdasarkan inilah, kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan hal-hal berikut:

BAB III

1. Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya

Untuk mengetahui lebih jelas tentang keberadaan pengadilan Agama Surabaya maka penulis mengemukakan tentang keadaan geografis. Wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah Kota Madya Surabaya yang terdiri dari 5 wilayah pembantu Wali Kota Madya Surabaya yakni Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat.

¹ <http://pasurabaya.pta-surabaya.go.id/index.php>

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Pembagian kekuasaan antara Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif, dimana wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya adalah seluruh daerah yang berada di wilayah Kota Surabaya, yang terletak di 5 kawasan di Surabaya yang terdiri dari 31 kecamatan yakni Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, dan Surabaya Barat.

Sedangkan kekuasaan absolut (wilayah perkara) Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 j. o. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama:

Ibu Kota Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara R.I No. 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama.

Sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir

sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi- instansi lain. Struktur ini sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 j.o. Keputusan Menteri Agama Nomor : 303/1990 tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagaimana terlampir.

C. Deskripsi Kasus tentang Tergugat tidak *Legal Standing* dalam Perkara Waris No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby

Kasus yang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Surabaya terdaftar dengan Nomor Perkara 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan Nomor Perkara 80/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Perkara waris tentang tergugat tidak memiliki *legal standing* ini di Pengadilan Agama Surabaya diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, yaitu : Dra. Hj. Hasnawaty A, SH, MH sebagai ketua majelis, Drs. H. A. Bisri Mustaqim, MH dan Drs. H. Muhtarom, SH sebagai hakim anggota.

Di mana perkara ini merupakan perkara sengketa waris antara:

Tuminah binti Temo, sebagai Penggugat I; Legintri binti Kastur, sebagai Penggugat II ; Satumi binti Satumin, sebagai Penggugat III ; Harto bin Satumin, sebagai Penggugat IV ; Sutiani binti Satumin, sebagai Penggugat V ; Sumiati binti Satumin, sebagai Penggugat VI ; Kusnan bin Satumin, sebagai Penggugat VII ; Sumaiyah binti Satumin, sebagai Penggugat VIII ; Warni / Wagisa binti Darso Sentono, sebagai Penggugat IX ; Sugi Waras binti Slamet, sebagai Penggugat X ; Betty binti Slamet, sebagai Penggugat XI ; Rini binti Slamet, sebagai Penggugat XII ; Rika Surip binti Slamet, sebagai Penggugat XIII ; Sri Rahayau binti Slamet, sebagai Penggugat XIV ; Wahyuni binti Slamet, sebagai Penggugat XV.

Yang melawan:

Rubai bin Sutio, sebagai Tergugat I ; Tiali Handoko bin Sutio, sebagai Tergugat II ; Djiman al. Satiman, sebagai Tergugat III ; Sauman, sebagai Tergugat IV ; Sablah, sebagai Tergugat V ; Nurida Elfia, sebagai Tergugat VI, Nur Intan Sri Utami binti Rejo, sebagai Tergugat VII ; Rami binti Kastur, sebagai Tergugat VIII.

Dan duduk perkara dalam perkara ini adalah: bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami istri bernama Siman alias Kemis (suami) dengan istrinya bernama Simah, yang keduanya telah meninggal dunia di Surabaya sekitar tahun 1932.

Dalam perkawinan antara Siman alias Kemis dengan Mbok Simah telah dilahirkan 6 (enam) anak yaitu: Siman, Kastur, Ratmo P. Djani, Temo, Kardji, dan Dilem. Bahwa anak yang pertama yaitu Siman bin Kemis telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak.

Anak kedua bernama Kastur bin Kemis (sudah meninggal dunia) dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Rami bin Kastur (Tergugat VIII), Sarwi binti Kastur (sudah almarhum dan tidak mempunyai anak), Slamet bin Kastur (sudah almarhum dan mempunyai istri bernama Warni/Wagisa binti Darso Sentono (Penggugat IX) dan mempunyai 6 (enam) anak yaitu bernama Sugi Waras bin Slamet (Penggugat X), Betty bin Slamet (Penggugat XI), Rini binti Slamet (Penggugat XII), Rika Surip binti Slamet (Penggugat XIII), Sri Rahayu binti Slamet (Penggugat XIV), dan Wahyuni binti Slamet (Penggugat XV). Anak keempat Kastur bernama Sumo bin Kastur (sudah meninggal dan tidak mempunyai anak), dan anak kelima bernama Legintri binti Kastur (Penggugat II).

Anak yang ketiga bernama Ratno P. Djani bin Kemis (sudah almarhum dan mempunyai dua anak bernama Tono atau Tomo (sudah almarhum dan tidak mempunyai anak) dan Mbok Mudrikah atau Mudrikah binti Ratmo (sudah almarhum dan tidak punya anak).

Anak keempat bernama Temo bin Kemis (sudah almarhum) dan mempunyai satu anak bernama Tuminah binti Temo (Penggugat I). Kemudian

anak kelima bernama Kardji bin Kemis (sudah almarhum) mempunyai tiga anak yakni: 1. Sapani binti Kardji (sudah almarhum) bersuamikan Satumin (almarhum) mempunyai enam orang anak yakni: Satumi binti Satumin (Penggugat III), Harto bin Satumin (Penggugat IV), Sutiani binti Satumin (Penggugat V), Sumiati binti Satumin (Penggugat VI), Kusnan bin Satumin (Penggugat VII), Sumaiyah binti Satumin (Penggugat VIII), 2. Mail bin Kardji (sudah almarhum dan tidak mempunyai anak), 3. Kasti bin Kardji (sudah almarhum dan tidak mempunyai anak). Untuk anak yang keenam bernama Dilem binti Kemis (sudah almarhum sejak muda) dan tidak mempunyai anak.

Semasa hidupnya, Siman alias Kemis pernah memiliki harta berupa tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya, yang telah diwariskan kepada alm. Ratmo P. Djani yaitu sesuai:

1. Persil 115 Klas D.I, Petok No. 356 seluas kurang lebih 960 m2 atas nama Mundrikah binti Ratmo, yang sudah bersertifikat SHM No. 337 atas nama Mudrikah, luas 1095 m2. Gambar situasi No. 5496, Tgl. 10-3-1984, Kelurahan Lidah Kulon, Dengan batas-batas: sebelah utara tanah milik Pak Yohanes/bengkel Pak Yohanes, sebelah timur tanah milik H. Mijan, sebelah selatan tanah kavlingan P. Tono, dan sebelah barat jalan raya Wisma Lidah Kulon.

dibalik nama menjadi atas nama Taker dan Rejo dengan dasar Akta Pembagian Waris dari Pengadilan Agama Surabaya tanggal 6 April 1994, No. 144/Komp./1994/PA. Sby, dimana dalam akta tersebut disebutkan bahwa Mudrikah kawin dengan Djiman alias Satiman (Pemohon 4) atau sekarang Tergugat III, yang dalam perkawinannya dikaruniai dua anak yaitu Taker (Pemohon 2) dan Rejo (Pemohon 3). Padahal fakta yang sebenarnya ada, Mudrikah dalam perkawinannya dengan Djiman al. Satiman (Tergugat III) tidak pernah dikaruniai keturunan atau anak.

Setelah meninggalnya Tono, maupun Taker dan Rejo, obyek waris yang belum dibagi waris tersebut di atas, baik yang atas nama Mudrikah dan Tomo bin Ratno saat ini telah dikuasai dan dihaki oleh para tergugat yakni terhadap obyek waris tanah: a) Sertifikat Hak Milik No. 67, seluas 2160 m2. Gambar situasi No. 1619, Tgl. 13-2-1984, atas nama Mudrikah, terletak Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya; b) Persil 92 Klas D.I, Petok No. 915 seluas kurang lebih 1090 atas nama Tomo bin Ratno, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya; c) Persil 89 Klas D.I, Petok No. 915 seluas kurang lebih 1020 m2 atas nama Tomo bin Ratno, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, oleh Rubai bin Sutio (Tergugat I), Djiman al. Satiman (Tergugat III), Sauman (Tergugat IV), Sablah (Tergugat V), Rami binti Kastur (Tergugat VIII). Dan terhadap obyek waris tanah Sertifikat Hak Milik No. 337, seluas 1095, gambar situasi No. 5496, Tgl. 10-3-1984, atas nama

Mudrikah, terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya oleh Nurida Elfia (Tergugat VI), Nur Intan Sri Utami binti Rejo (Tergugat VII) dan Tiali Handoko bin Sutio (Tergugat II).

Bahwa setelah para penggugat mengetahui yang menguasai obyek waris peninggalan almarhumah Mudrikah dan Tono adalah para tergugat, maka para penggugat sudah mengadakan pendekatan dan berniat membagi harta waris sesuai dengan hukum Islam, mengingat seluruh waris adalah beragama Islam. Tetapi para tergugat telah menunjukkan perlawanannya kepada para penggugat, sehingga seluruh waris bersepakat untuk memasukkan gugatan waris tersebut di Pengadilan Agama Surabaya.

Oleh karena itu para penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara harta waris ini untuk dapat menentukan bagiannya masing-masing ahli waris secara adil dan bijaksana sesuai hukum Islam.

Bahwa karena dikhawatirkan para tergugat akan menjual dan mengalihkan tanah obyek waris tersebut, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek harta waris tersebut di atas.

Bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil dan memeriksa kedua pihak serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan atas nama obyek harta sesuai yang diuraikan dalam:
 - a. Persil 115 Klas D.I, Petok No. 356 seluas kurang lebih 960 m² atas nama Mundrikah binti Ratmo, yang sudah bersertifikat SHM No. 337 atas nama Mudrikah, luas 1095 m². Gambar situasi No. 5496, Tgl. 10-3-1984, Kelurahan Lidah Kulon, Dengan batas-batas: sebelah utara tanah milik Pak Yohanes/bengkel Pak Yohanes, sebelah timur tanah milik H. Mijan, sebelah selatan tanah kavlingan P. Tono, dan sebelah barat jalan raya Wisma Lidah Kulon.
 - b. Persil 92 Klas D.I, Petok No. 356 seluas kurang lebih 1900 m² atas nama Mundrikah binti Ratmo, yang sudah bersertifikat SHM No. 67 atas nama Mudrikah, luas 2160 m². Gambar situasi No. 1619, Tgl. 13-2-1984, Kelurahan Lidah Kulon. Dengan batas-batas: sebelah utara jalan kampung, sebelah timur tanah atas nama Tono bin Ratmo, sebelah selatan jalan raya Menganti, sebelah barat jalan kampung.
 - c. Persil 92 Klas D.I, Petok No. 915 seluas kurang lebih 1090 m² atas nama TOMO bin RATNO, Kelurahan Lidah Kulon. Dengan batas-batas: sebelah utara jalan kampung, sebelah timur tanah milik Ibu Sapani, sebelah selatan jalan raya Menganti, sebelah barat tanah atas nama MUDRIKAH.

- Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, dan setelah Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya untuk rukun dan menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, Saudari Sablah oleh Para Penggugat ditetapkan tergugat V, padahal Saudari Sablah sudah meninggal dunia sejak tahun 2006, dengan demikian telah nyata bahwa gugatan ini tidak disusun dengan cermat dan hanya bersifat spekulatif, padahal mestinya identitas para pihak merupakan faktor penting dalam mengajukan sebuah gugatan, jika terjadi kesalahan dalam menyebutkan dan atau menentukan identitas para pihak maka secara umum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa, uraian Posita pada poin 1 sampai dengan poin 8 hanya bercerita dengan data spekulatif, Para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas tanggal, bulan dan tahun berapa pihak meninggal dunia ? Padahal dalam ilmu Faraid kepastian meninggalnya seseorang sangat penting karena terkait

dengan penentuan siapa sebagai pewaris dan siapa ahli waris. Dengan demikian uraian Gugatan Para Penggugat memenuhi kriteria gugatan yang kabur (*Abscuur Libel*) sehingga menyulitkan pemeriksaan perkara ini, khususnya menyulitkan Para Penggugat dalam melakukan pembelaan;

4. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat pada point 12 sangat tidak bisa dipahami, sebab uraian dalil tersebut menyatakan alm. Mudrikah pernah mengangkat pekerja/ pegawai yang bernama Taker dan Rejo, hal ini merupakan dalil yang sangat ngelantur, dan tidak ada relevansinya dengan perkara ini.

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa, para Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh para Tergugat.
2. Bahwa, obyek sengketa, merupakan harta peninggalan dari almarhumah Mudrikah yang pada tahun 1994 telah dibagi waris sebagaimana tercantum dalam Akta Pembagian Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 144/Komp./1994/PA.SBY. Sehingga tidak ada alasan bagi para Penggugat untuk menuntut pembagian waris atas obyek sengketa tersebut.
3. Bahwa, pembagian harta waris sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Akta Pembagian Waris Nomor: 144/Komp./1994/PA.SBY sudah tepat dan tidak ada kekeliruan apapun.

sehingga tidak ada alasan hukum untuk membatalkan Akta Pembagian Waris tersebut.

4. Bahwa, pada tahun 1994 setelah meninggalnya almarhumah Mudrikah, maka ahli waris dari almarhumah Mudrikah yang ada dan berhak mendapat bagian harta waris hanyalah.
 - Djiman al. Sakiman sebagai suami almarhumah Mudrikah.
 - Tono sebagai saudara laki-laki seapak dan seibu dari Almarhumah Mudrikah.
 - Taker sebagai anak dari Almarhumah Mudrikah.
 - Rejo sebagai anak dari Almarhumah Mudrikah.
5. Bahwa, para Penggugat tidak memiliki *legal standing* kedudukan hukum untuk bertindak mengajukan gugatan ini, sebab para Penggugat merupakan keluarga yang memiliki hubungan kerabat sangat jauh, sehingga para Tergugat tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mendapat bagian dari harta sengketa.
6. Bahwa, dalam ilmu Faraid ada istilah ahli waris Aşabah, yaitu ahli waris yang dapat mengambil semua harta atau sisa harta dari ketentuan yang ada, yang dalam kasus ini adalah Tono sebagai saudara laki-laki seibu seapak dari almarhumah Mudrikah, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Nisā' ayat 176, yang artinya: "Saudara yang laki-laki mempunyai seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak".

7. Bahwa, dengan hukum tersebut pada poin 6 maka para Penggugat terhibab/ terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta sengketa tersebut, dan dengan terhibabnya Para Penggugat tersebut secara otomatis para Penggugat tidak memiliki *legal standing* kedudukan hukum untuk bertindak mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa, dalam Akta Pembagian Waris Nomor: 144/Komp./1994/PA.Sby, telah secara tegas dinyatakan bahwa Tono dan Djiman al. Sakiman selaku ahli waris dari almarhumah Mudrikah menyerahkan seluruh bagiannya kepada Taker dan Rejo tanpa syarat apapun dan selanjutnya Taker dan Rejo menerima juga tanpa syarat apapun.
9. Bahwa, dengan meninggalnya Taker, maka harta jatuh ke tangan ahli warisnya yaitu Sauman (Tergugat IV), Rubai (Tergugat I), Tiali Handoko (Tergugat II). Dan meninggalnya Rejo, maka harta jatuh ke tangan ahli warisnya yaitu Nurida Elfi (Tergugat VI) dan Nur Intan Sri Utami (Tergugat VII).
10. Bahwa, dengan meninggalnya Tono, maka pada waktu itu harta jatuh ke tangan ahli warisnya yaitu Sablah (Tergugat V) yang saat ini telah meninggal.
11. Bahwa, dengan demikian tidak ada lagi dalil yang dapat digunakan oleh Para Penggugat untuk meminta pembagian Harta sengketa.

12. Bahwa, permohonan Sita Jaminan dari Para Penggugat sangat tidak patut untuk dikabulkan, sebab:

- Telah nyata Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan keterkaitan dengan obyek sengketa.
- Obyek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan saat ini sudah bukan atas nama Mudrikah dan Tono sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, sehingga jika dipaksakan untuk dilakukan sita jaminan, maka akan terjadi kesalahan besar dalam proses pemeriksaan perkara ini.

Para Tergugat, mohon agar Majelis Hakim segera memutuskan perkara ini dengan putusan:

Primeir:

1. Menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para
Penggugat dalam menanggapi jawaban para Tergugat tersebut, telah mengajukan

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang diajukan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa eksepsi pada poin 1 (satu) bahwa Sablah sebagai Tergugat V telah meninggal dunia sejak tahun 2006, maka secara umum kesalahan dalam menentukan identitas. Faktor identitas penting dalam mengajukan maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 (satu) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah perkara yang berkenaan dengan kewarisan, maka apabila Tergugat V telah meninggal dunia (vide surat panggilan/ relaas Tergugat V tertanggal 4 Juli 2007 dan bukti T.4), bahwa Tergugat V telah meninggal dunia maka surat panggilan seharusnya ditujukan kepada ahli warisnya untuk mendapatkan hak-hak dalam membela kepentingan-kepentingannya, dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, namun Tergugat V semasa hidupnya tidak mempunyai anak (keturunan), sehingga Tergugat V tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk dihadirkan lagi dalam sidang-sidang selanjutnya, hal ini sesuai dengan pasal 290 HIR ayat (2).

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat poin 4 (empat) dalam dupliknya tentang kekacauan materi gugatan yakni tentang surat para Penggugat, gugatan mana yang dipakai ? karena surat gugatan tanggal 20 Juni 2007, lalu dirubah/ direvisi tanggal 8 Oktober 2007, sehingga para Tergugat

keberatan dengan perubahan gugatan tersebut karena jelas-jelas menyulitkan para Tergugat dalam melakukan pembelaan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebatas menambahkan bin/binti di belakang nama-nama para Penggugat dan para Tergugat. Dan surat gugatan yang dipakai untuk ditanggapi oleh para Tergugat adalah gugatan yang tertulis yang telah direvisi, dan perubahan tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak menambah dasar-dasar tertulis, dan selanjutnya masalah perubahan gugatan, HIR tidak mengatur, namun perubahan tersebut tidak boleh jauh menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, namun perubahan gugatan tidak diajukan pada tahap pemeriksaan hampir selesai, dan hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 dijelaskan bahwa perubahan gugatan tidak diperbolehkan lagi jika pemeriksaan perkara hampir selesai.

Menimbang, bahwa eksepsi poin 2 (dua), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) yang diajukan dalam jawaban para Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut bersama dengan pokok perkara sesuai dengan kehendak pasal 136 HIR, bahwa eksepsi selain Hakim tidak berkuasa tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Tergugat dan para Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 118 HIR, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waris sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah penentuan yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan

menerangkan bahwa Mudrikah adalah anak kandung dari Suratmo, dan hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, maka telah terbukti bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan dengan almarhum Siman, Ratmo P. Djani dan Mudrikah.

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat (Mat Bahri bin Senari) yang menerangkan bahwa Ratmo P. Djani, bapaknya (orang tuanya) bernama Siman, dan Ratmo P. Djani mempunyai saudara kandung diantaranya bernama: Kastur dan Temo, dalam bukti P.4 dan T.5, tentang Akta Pembagian Waris Ratmo P. Djani al. Suratmo mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Mudrikah binti Suratmo dan Tono bin Suratmo, namun keterangan saksi tersebut menjelaskan bahwa Mudrikah dan Tono tidak dikaruniai anak alias tidak mempunyai keturunan.

Menimbang, bahwa ternyata para ahli waris yang diajukan oleh para Penggugat kesemuanya adalah ahli waris yang disebabkan kekerabatan (hubungan darah) dari pewaris (Mudrikah dan Tono), para Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris yang disebabkan oleh pernikahan/perkawinan, seperti istri Temo, suami Legintri, istri Siman, istri Kastur, istri Kardji.

Menimbang, bahwa salah satu rukun waris yaitu penerima waris, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan karena hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan.

Menimbang, bahwa petitum poin 7 (tujuh) oleh para Penggugat telah dijelaskan di atas, bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan kekerabatan dengan para Tergugat sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas obyek waris yang tercantum dalam Akta Pembagian Waris, maka para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang menyatakan Akta Pembagian Waris tersebut tidak mempunyai alasan keabsahan/kekuatan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan pembuktian akta otentik tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan sebuah akta otentik, pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa suatu akta

otentik memberikan diantara pada pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Bahwa pada tahun 1960 dan tahun 1968 telah meninggal dunia pasangan suami istri Suratmo dengan Keminten, yang dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua anak, yaitu;

Bahwa dengan demikian ahli waris almarhum Suratmo dan almarhumah Keminten adalah Tono (Pemohon 1) selaku anak kandung, Taker (Pemohon 2), Rejo (Pemohon 3) masing-masing anak kandung Mudrikah dan Djiman al. Satiman (Pemohon 4) selaku suami dari Mudrikah, masing-masing menggantikan kedudukan Mudrikah sebagai ahli waris dari Suratmo dan Keminten.

Bahwa harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut berupa:

Bahwa keterangan tersebut diatas, para tergugat memberikan jawaban yang membenarkan gugatan para penggugat bahwa Taker dan Rejo bukan anak kandung dari almarhumah Mudrikah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat mendukung kebenaran Akta Pembagian Waris yang menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Mudrikah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Taker dan Rejo, sehingga keterangan yang tertuang dalam akta tersebut berdampak hukum, yaitu menjadikan Taker dan Rejo sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Mudrikah.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan para tergugat yang menerangkan bahwa Taker dan Rejo adalah anak angkat dari Mudrikah sehingga dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang tertuang dalam Akta Pembagian Waris tersebut adalah pengakuan rekayasa. Maka perbuatan hukum yang tertuang dalam akta tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat mampu membuktikan sebaliknya, yakni alat bukti surat (P.4 dan T.5), sehingga haruslah dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Taker dan Rejo bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Mudrikah.

Ketiga, bahwa dalam gugatan tidak menyebutkan tanggal-tanggal kematian dari para kerabat yang (diperkirakan) ada kaitannya dengan pewaris maupun ahli waris (yang kemudian menjadi pewaris) dalam perkara ini.

Keempat, dalam posita 12 para Penggugat/Terbanding mencantumkan tindakan almarhumah Mudrikah yang mengangkat karyawan (Taker dan Rejo), yang secara substansial tidak ada kaitannya sama sekali dengan harta obyek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada butir pertama tersebut majelis hakim Pengadilan Agama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena Tergugat V telah meninggal dunia maka panggilan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 390 ayat (2) HIR yaitu disampaikan kepada ahli warisnya untuk mendapatkan hak-haknya dan membela kepentingan-kepentingannya.
- b. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Tergugat V tidak mempunyai keturunan (anak) maka Tergugat V tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk dihadirkan lagi dalam sidang-sidang selanjutnya.
- c. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi para Tergugat/Pembanding dinilai tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan-pertimbangan dan tindakan majelis hakim Pengadilan Agama terhadap eksepsi

para Tergugat/Pembanding pada butir pertama tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa dalam perkara a quo majelis hakim Pengadilan Agama telah khilaf dalam penerapan hukumnya, dimana seharusnya setelah terbukti bahwa Tergugat V benar-benar telah meninggal dunia sesuai dengan relaas panggilan terhadap Tergugat V tertanggal 4 Juli 2007 dan dikuatkan lagi dengan bukti T. 4 (surat kematian a/n. Sablah), sementara para Penggugat/Terbanding masih mencantumkan Sablah sebagai Tergugat V maka Pengadilan Agama harus menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/Terbanding tersebut telah memiliki cacat formil, dengan demikian sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan bahwa oleh karena semasa hidupnya Tergugat V tidak memiliki anak (keturunan) maka Tergugat V tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping itu perlu ditambahkan disini bahwa dengan mempertimbangkan dan/atau menyimpulkan bahwa Tergugat V tidak mempunyai (keturunan) berarti sudah masuk dalam pokok perkara, karena untuk mengetahui ada keturunan atau tidak ada keturunan (terbukti apa tidak, mengenai ada, atau tidak adanya keturunan tersebut) harus melalui lembaga pembuktian dan ini berarti sudah masuk dalam pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Tergugat/Pembanding dalam eksepsi telah dikabulkan maka segala hal yang berkaitan dengan pokok

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA SURABAYA OLEH PTA SURABAYA

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan yang dibentuk
 ra sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari
 khususnya yang beragama Islam. Oleh karena itu sebagai orang yang
 ai kekuasaan menentukan nasib seseorang yang mencari keadilan,
 u seorang hakim dalam memberikan keputusan haruslah bersikap lebih
 i dan adil, baik dari segi hukum formil maupun hukum materiil.

Dalam perkara waris yang penulis teliti ini, Pengadilan Agama memutuskan dan mengadili sebagaimana diterangkan bab 3 di atas. Adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau Eksepsi para tergugat ditolak karena majelis hakim menganggap para tergugat tidak beralasan menurut hukum.

Eksepsi para tergugat mengenai dua hal yakni mengenai salah seorang yakni tergugat V yang sudah meninggal dunia tetap dimasukkan

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 100

sebagai tergugat dalam gugatan dan yang kedua mengenai perubahan gugatan. Tergugat menganggap secara umum terjadi kesalahan dalam menentukan identitas, karena tergugat V yang telah meninggal dunia tetap penggugat masukkan dalam gugatan. Faktor identitas penting dalam mengajukan gugatan, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak diterima menurut para tergugat.

Sedangkan majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena perkara ini berkenaan dengan kewarisan, maka apabila tergugat V telah meninggal dunia yang dapat dilihat dari surat panggilan/relaas tergugat V tertanggal 4 Juli 2007 dan bukti T.4. Bahwa tergugat V telah meninggal dunia maka surat panggilan seharusnya ditujukan kepada ahli warisnya untuk mendapatkan hak-hak dalam membela kepentingan-kepentingannya, dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Namun tergugat V semasa hidupnya tidak mempunyai anak (keturunan), sehingga tergugat V tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk dihadirkan lagi dalam sidang-sidang selanjutnya.

Majelis hakim mempertimbangkan demikian karena hal ini sesuai dengan pasal 390 HIR ayat (2) dan bersesuaian pula dengan pendapat Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., dalam bukunya Penerapan Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama:

Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dengan cara menyampaikannya secara

langsung kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa atau Lurah.²

Majelis hakim menganggap tergugat V tidak memiliki *legal standing* karena dia telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk dihadirkan lagi dalam persidangan. *Legal standing* adalah kewenangan sah atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bertindak di depan pengadilan. Jadi orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak lagi memiliki *legal standing*. Majelis hakim hanya menganggap tergugat V tidak memiliki *legal standing* tetapi mengabaikan eksepsi tergugat bahwa dengan meninggalnya tergugat V maka telah terjadi kesalahan identitas yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Majelis hakim tidak menganggap terjadi kesalahan identitas namun hanya mempertimbangkan bahwa meskipun telah meninggal dunia majelis hakim beranggapan mungkin tergugat V masih mempunyai ahli waris yang bisa menggantikan posisi tergugat V dalam pengadilan. Namun setelah dilakukan pemanggilan berkali-kali terhadap tergugat V barulah diketahui bahwa selain tergugat V sudah meninggal ternyata tergugat V juga tidak memiliki ahli waris.³

Menurut penulis, sebenarnya memang terjadi kesalahan identitas dalam gugatan. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa dimasukkan sebagai tergugat, kalau meninggalnya setelah gugatan masuk di

² Abdul Manan, *Pencrapan Hukum Acara Perdata Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 143

³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Ibu Dra. Hj. Hasnawaty A., SH. MH, tanggal 14 Juli 2009

Mengenai gugatan penggugat yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Mudrikah dan Tono, penulis setuju dengan pendapat majelis hakim. Meskipun telah jelas para penggugat merupakan ahli waris dari Mudrikah dan Tono dari jalur kekerabatan, namun dalam gugatan tersebut tidak menjelaskan para ahli waris yang disebabkan pernikahan. Serta dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci peristiwa kematian semua ahli waris sebagai dasar menentukan kedudukan ahli waris selanjutnya untuk dapat dikategorikan ahli waris pengganti, sesuai kehendak pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga petitum penggugat yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang sah tidak lengkap sehingga dinyatakan ditolak.

Kemudian mengenai petitum poin 7 yang berkenaan dengan Akta Pembagian waris dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 144/Komp./1994/PA. Sby. Penulis sependapat dengan pendapat majelis hakim. Meskipun akta tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, namun apabila terdapat kejanggalaan maka harus dibuktikan lagi kebenaran isinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. R. Soebekti, S.H., menurut beliau akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, bahwa ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁴

Dengan melihat pengakuan tergugat yang menyatakan bahwa Taker dan Rejo merupakan anak angkat Mudrikah dan keterangan saksi-saksi dari penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa Taker dan Rejo bukan anak kandung Mudrikah. Maka sudah jelas maka dalam Akta Pembagian Waris No. 144/Komp./1994/PA. Sby terdapat pengakuan rekayasa sehingga tidak mempunyai keabsahan dan kekuatan hukum, oleh karena itu batal demi hukum.

Jadi kesimpulannya, menurut penulis mengapa majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat yakni karena majelis hakim berpendapat bahwa

⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, h. 27

**B. Analisis terhadap Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby**

Dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan pihak yang tidak puas adalah banding. Banding adalah permohonan pemeriksaan kembali terhadap

putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut ke pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) yang mewilayahi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut, dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa syarat formil gugatan yang ternyata menurut pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya gugatan penggugat dalam perkara waris tersebut mengandung cacat formil karena terdapat salah seorang yang telah meninggal dunia tetap dicantumkan sebagai tergugat. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya telah khilaf dalam penerapan hukumnya, seharusnya setelah terbukti bahwa tergugat V benar-benar telah meninggal dunia sesuai dengan relaas panggilan terhadap tergugat V tertanggal 4 Juli 2007 dan dikuatkan lagi dengan bukti T. 4 (surat kematian a/n Sablah) maka jelas terdapat cacat formil dan gugatan seharusnya tidak dapat diterima. Tetapi para penggugat/terbando masih mencantumkan Sablah sebagai tergugat V dan Pengadilan Agama tetap menerima gugatan penggugat.

Menurut penulis, alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menilai bahwa terdapat cacat formil dalam surat gugatan sudah tepat. Karena terdapat kesalahan identitas dalam gugatan yang tidak sesuai dengan pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni Sablah yang telah meninggal dunia tetap dijadikan tergugat V, padahal Sablah sudah tidak memiliki *legal standing*. Oleh karena itu menyebabkan cacat formil kesalahan identitas dan salah sasaran pihak yang digugat sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Salah satu hal penting yang harus diperiksa dalam pengadilan tingkat banding adalah berkenaan dengan materi perkara untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan pengambilan putusan ditinjau dari segi prosedural dan substansial yakni surat gugatan yang diajukan penggugat. Majelis hakim harus memeriksa syarat formil gugatan terlebih dahulu untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil atau tidak, karena syarat formil memiliki implikasi yang menentukan atas keabsahan gugatan. Apabila sah, proses pemeriksaan dan putusan pokok perkara yang dijatuhkan secara formil sah. Sebaliknya, jika gugatan cacat formil, berarti proses dan putusan pokok perkara yang dijatuhkan secara formil tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁶ Dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah bertindak seperti di atas yakni memeriksa syarat formil kemudian majelis hakim menyatakan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Jadi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima sudah tepat, meskipun dalam gugatan tersebut ada akta pembagian waris yang jelas-jelas terdapat pengakuan rekayasa yang bertentangan dan melawan hukum yang harus dibatalkan. Memang ironis,

⁶ Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, h. 128

kebenaran dan keadilan terpaksa dikorbankan demi tegaknya syarat formil. Namun sikap dan prinsip ini mesti diterapkan hakim sebagai hukum resmi, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara.⁷

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/ PA. Sby Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/ PTA. Sby tentang Tergugat tidak *Legal Standing* dalam Perkara Waris

Dalam gugatan waris ini masalah pokok yang menyebabkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah berpangkal dari keberadaan Sablah yang telah meninggal dunia tetap dimasukkan sebagai pihak yang digugat yakni sebagai tergugat V. Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menilai bahwa tergugat V tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam persidangan tanpa menilai apakah terdapat kesalahan identitas yang menyebabkan gugatan cacat formil atau tidak.

Sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai dengan adanya tergugat V yang sudah meninggal tetap dijadikan pihak yang digugat maka terdapat cacat formil dalam gugatan yakni kesalahan identitas.

Dalam hukum Islam perihal tentang *legal standing* ini memang tidak secara eksplisit diterangkan. Namun *legal standing* ini dapat dihubungkan dengan

⁷ *Ibid*, h. 43

telah meninggal dunia. Namun orang yang telah meninggal dunia dapat dianalogikan dengan orang yang tidur. Orang yang sudah meninggal dunia sudah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dunia, jadi apabila masih dituntut dengan dijadikan sebagai tergugat maka tidak dibenarkan tuntutan tersebut.

Kalau dilihat dari segi *ahliyyah*, orang yang telah meninggal dunia sudah tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan bertindak di depan hukum. Karena *ahliyyah (al-wājib)* itu dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan hilang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia. Juga dalam *ahliyyah* terdapat dua macam halangan yakni halangan yang datangnya dari Allah bukan disebabkan perbuatan manusia dan halangan yang disebabkan perbuatan manusia. Orang yang meninggal dunia ini dapat dikategorikan sebagai halangan yang datangnya dari Allah dan halangan ini menyebabkan kecakapan seseorang bertindak hukum secara sempurna hilang sama sekali. Ini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimana Sablah yang sudah meninggal dunia tidak bisa dituntut dijadikan tergugat V karena sudah tidak mempunyai kecakapan bertindak/kapasitas (*legal standing*). Sehingga pembatalan putusan ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dan orang yang meninggal dunia telah terputus semua amalnya kecuali tiga perkara yaitu şadaqah, ilmu yang bermanfaat, dan anak şaleh yang mendoakan bapak ibunya. Hadis Nabi SAW:

Jika dihubungkan dengan kasus di atas maka orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa digugat karena hak dan kewajiban hukumnya di depan pengadilan telah gugur. Jikalau Sablah/tergugat V mempunyai ahli waris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya jika gugatannya diajukan sebelum dia meninggal dunia sehingga gugatannya dapat diterima. Tetapi gugatan di atas diajukan setelah tergugat V meninggal dunia dan dia juga tidak memiliki ahli waris maka sepatutnya memang gugatan penggugat tidak dapat diterima.

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat karena majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pembuktian tidak terjadi kesalahan identitas dalam gugatan yakni surat panggilan ditujukan kepada tergugat V yang telah meninggal dunia digantikan ahli warisnya sesuai dengan pasal 390 ayat (2) HIR sehingga hukum formilnya tetap terpenuhi dan gugatan tetap bisa diterima. Majelis hakim juga ingin membatalkan Akta Pembagian Waris No. 144/Komp./1994/PA. Sby yang di dalamnya terdapat pengakuan rekayasa.
2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby karena menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdapat kesalahan identitas dalam gugatan yang tidak sesuai dengan pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni Sablah yang telah meninggal dunia tetap dijadikan tergugat V, padahal Sablah sudah tidak memiliki *legal standing*. Oleh karena itu menyebabkan cacat formil kesalahan identitas dan salah sasaran pihak yang digugat sehingga gugatan tidak dapat diterima.
3. *Legal standing* ini dapat dihubungkan dengan istilah *ahliyyah* (kecakapan). Orang yang telah meninggal dunia dapat dianalogikan dengan orang yang

tidur. Orang yang sudah meninggal dunia sudah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dunia. Meninggal dunia juga merupakan halangan *ahliyyah* yang datangnya dari Allah dan halangan ini menyebabkan kecakapan seseorang bertindak hukum secara sempurna hilang sama sekali. Ini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimana Sablah yang sudah meninggal dunia tidak bisa dituntut dijadikan tergugat V karena sudah tidak mempunyai kecakapan bertindak/kapasitas (*legal standing*). Sehingga pembatalan putusan ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Hendaknya dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum dan tidak hanya mengutamakan salah satu dari hukum formil atau hukum materiilnya saja. Namun harus bisa seimbang diantara keduanya, sehingga tercipta keadilan dan mendatangkan kemaslahatan bersama diantara penggugat dan tergugat. Dan bagi pihak yang ingin mengajukan suatu gugatan di Pengadilan diharapkan lebih teliti dalam menentukan siapa-siapa saja orang yang bisa dijadikan penggugat dan tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005
- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud Juz 2, 3*, Beirut, Dār Al Kutub al 'Ilmiyah, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2004
- Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris al-Farā'id (Deskripsi Hukum Islam Praktis dan Terapan)*, Surabaya, Pustaka Hikmah Perdana, 2005
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawāris*, Bandung, Pustaka Setia, 2009
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawāris*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al Ma'arif, 1975
- Muslim Bin Hujjaj Ibnu Muslim, Al-Imam Abil Khusain, *Ṣaḥih Muslim Juz 2*, Dār al-Fikr, t.t.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang, Mujahidin, 1981
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004
- , *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 1998
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2005
- Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terjemahan A.M. Basalamah, Jakarta, Gema Insani Pers, 1995
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993

